

## **BAB I**

### **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Pemerintah Kota Madiun**

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal di atas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik, Pemerintah Kota Madiun juga telah membentuk PPID.

Pembentukan PPID di Pemerintah Kota Madiun ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang mana salah satu tugasnya adalah menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui pelayanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax, email, website PPID maupun media sosial yang dikelola oleh PPID.

## BAB II

### Gambaran Umum Kebijakan Pelaksanaan Informasi Publik

Kepedulian Pemerintah Kota Madiun dengan adanya keterbukaan informasi publik di Kota Madiun disikapi dengan adanya Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Melalui Peraturan Walikota tersebut, diatur pengelompokan informasi (klasifikasi informasi), akses informasi dan dokumentasi publik, hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, pembentukan PPID, kelembagaan PPID, Kelengkapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Daftar Informasi Publik (DIP), dan mekanisme permohonan informasi publik maupun jika terjadi sengketa informasi publik.

Melalui PPID Kota Madiun, segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses oleh pemohon atau masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas.

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

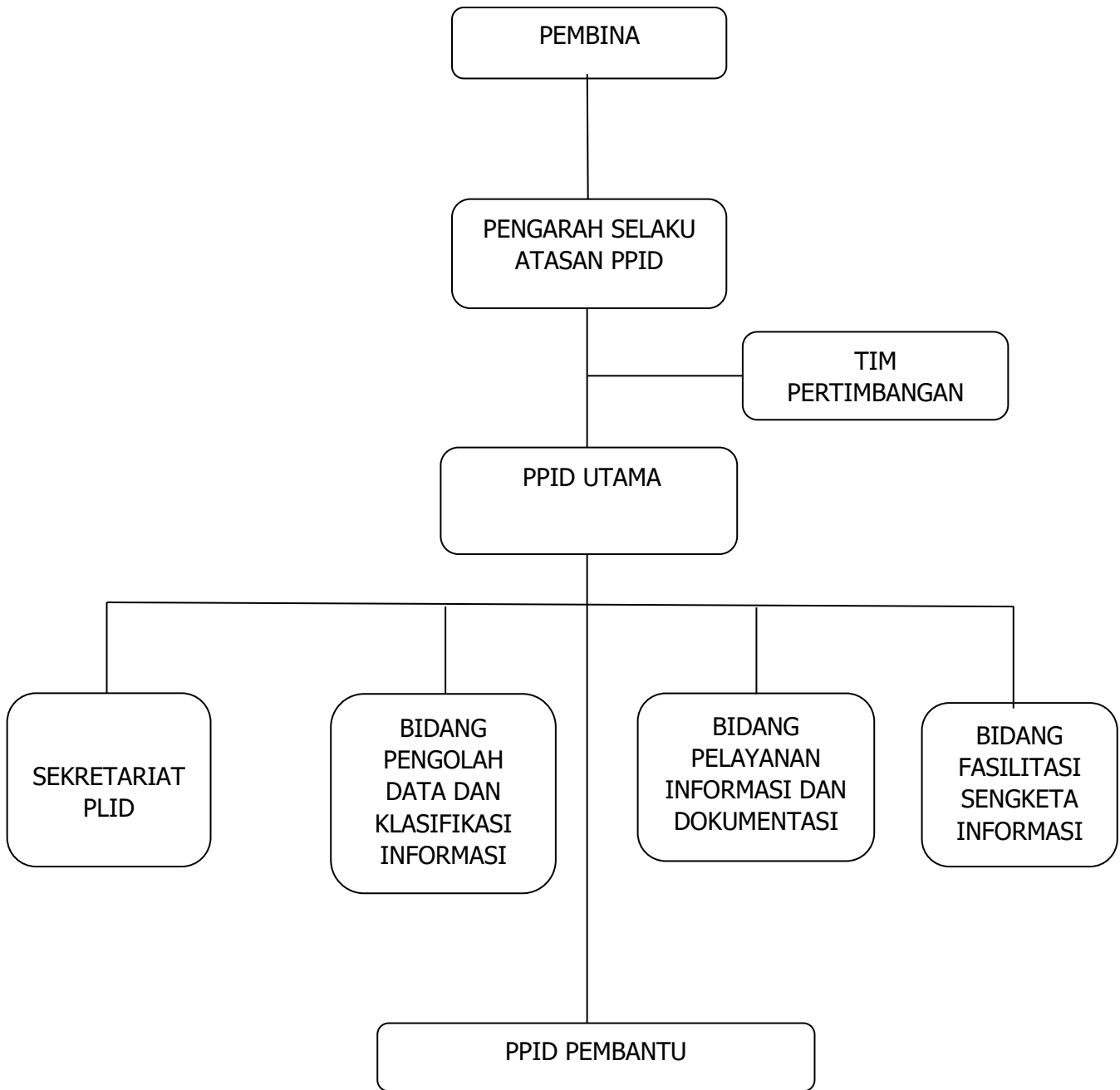
Pada tahun 2019 ini, gambaran umum pelayanan informasi publik melalui PPID Kota Madiun telah berjalan baik sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi publik sudah tersaji dan dapat disampaikan kepada masyarakat maupun pemohon informasi publik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan informasi publik di PPID Kota Madiun Tahun 2019.

## **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui beberapa media :

- 1.1 Melalui website
  - a. Ppid.madiunkota.go.id
  - b. Madiunkota.go.id
  - c. Madiuntoday.id
- 1.2 Melalui aplikasi E-PPID
- 1.3 Ruang pelayanan pengaduan / ruang PPID
- 1.4 Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0351) 467327 / Call Center 112
- 1.5 Melalui media sosial
  - a. FP Pemerintah Kota Madiun
  - b. FP Madiuntoday
  - c. Ig @pemkotmadiun\_
  - d. Ig @madiuntoday.id
  - e. Twitter @pemkotmadiun\_
  - f. Twitter @madiuntoday.id
  - g. Youtube Pemerintah Kota Madiun
- 1.6 Melalui aplikasi LAPOR SP4N!
- 1.7 Majalah Madiun Karismatik
- 1.8 Radio Suara Madiun
- 1.9 Melalui tatap muka / sosialisasi
- 1.10 Melalui grup whatsapp untuk mempermudah koordinasi PPID utama dengan PPID pembantu dalam melakukan pemenuhan informasi publik.
- 1.11 Monitoring dan Evaluasi / Visitasi PPID utama ke PPID pembantu.

## 2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Madiun



### 3. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, telah dibentuk susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Pembina	Walikota Madiun
II	Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
V	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat 2. Kepala Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat pada Sekretariat DPRD 3. Sekretaris Dinas Pendidikan 4. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga 5. Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 6. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 7. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kopreasi dan Usaha Mikro
9. Sekretaris Dinas Perdagangan
10. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Sekretaris Dinas Perhubungan
15. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
17. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
19. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
20. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
21. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
22. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah
26. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
27. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
28. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada

- Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
29. Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
  30. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretaris Daerah
  31. Kepala Sub Bagian Protokol dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
  32. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo
  33. Sekretaris Kecamatan Manguharjo
  34. Sekretaris Kecamatan Taman
  35. Kepala Sub Bagian Umum pada PD. Aneka Usaha Kota Madiun
  36. Direktur Umum pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
  37. Kepala Sub Bagian Umum pada PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun
  38. Lurah Oro-Oro Ombo
  39. Lurah Sukosari
  40. Lurah Klegen
  41. Lurah Rejomulyo
  42. Lurah Pilangbango
  43. Lurah Tawangrejo
  44. Lurah Kanigoro
  45. Lurah Kartoharjo
  46. Lurah Kelun
  47. Lurah Manguharjo
  48. Lurah Sogaten
  49. Lurah Patihan
  50. Lurah Ngegong
  51. Lurah Winongo
  52. Lurah Madiun Lor
  53. Lurah Pangongangan
  54. Lurah Nambangan Lor



	<p>V Bidang Pendukung</p> <p>1. Sekretariat</p> <p>    a. Koordinator</p> <p>    b. Anggota</p> <p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p> <p>    a. Koordinator</p> <p>    b. Anggota</p> <p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p> <p>    a. Koordinator</p>	<p>55. Lurah Nambangan Kidul</p> <p>56. Lurah Mojorejo</p> <p>57. Lurah Pandean</p> <p>58. Lurah Banjarejo</p> <p>59. Lurah Kuncen</p> <p>60. Lurah Manisrejo</p> <p>61. Lurah Kejuron</p> <p>62. Lurah Josenan</p> <p>63. Lurah Demangan</p> <p>64. Lurah Taman</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1) Kepala Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	---	--

<p>b. Anggota</p> <p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>1) Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2) Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>1) Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	---

## 5. Anggaran Pelayanan Informasi dan Penggunaannya

Pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan optimalisasi PPID Kota Madiun melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Madiun dianggarkan sebesar Rp.285.500.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk konsultasi, koordinasi, sosialisasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi PPID Kota Madiun. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

NO	HARI / TANGGAL	TEMA KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rabu, 6 Maret 2019	Rakor PPID oleh Kementrian Dalam Negeri	Di Swiss Belinn Hotel Mangga Besar Jakarta
2.	11 Maret s/d 29 Maret 2019	Monitoring dan evaluasi ke PPID Pembantu OPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD se Kota Madiun Semester I Tahun 2019	Di OPD/Kec/Kel/BUMD se Kota Madiun
3.	11 s/d 12 April 2019	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang dkecualikan	Di Ruang 13 Balai kota Madiun
4.	Senin, 22 Juli 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Admin PPID Pembantu	Di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

			Madiun
5.	31 Juli s/d 1 Agustus 2019	Pelatihan Admin PPID Pembantu Kota Madiun	Di Universitas Widya Mandala Kota Madiun
6.	Rabu, 28 Agustus 2019	Sosialisasi tentang Transparansi Anggaran dalam Keterbukaan Informasi Publik	Di Ruang 13 Balai Kota Madiun
7.	8 Oktober s/d 23 Oktober 2019	Monitoring dan evaluasi ke PPID Pembantu OPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD se Kota Madiun Semester II Tahun 2019	Di OPD/Kec/Kel/BUMD se Kota Madiun
8.	Kamis, 12 September 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Admin PPID Pembantu Kota Madiun	Di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
9.	23 s/d 24 September 2019	Pelatihan Admin PPID Pembantu Kota Madiun	Di Hotel Aston Madiun
10.	Rabu, 30 Oktober 2019	Rapat Koordinasi Persiapan Pelatihan Admin PPID Pembantu Kota Madiun	Di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
11.	6 s/d 7 November 2019	Pelatihan Admin PPID Pembantu Kota Madiun	Di The Sun Hotel Madiun
12.	Senin, 23 Desember 2019	PPID Award Tingkat Kota Madiun Tahun 2019	Di The Sun Hotel Madiun

**BAB III****Rincian Pelayanan Informasi****1. Jumlah Permohonan Informasi Publik**

**LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PPID KOTA MADIUN TAHUN 2019**

NO.	NAMA	WAKTU YANG DIPERLU KAN	PERMOHONAN INFORMASI		JENIS PERMOHONAN INFORMASI	KETERANGAN
			DIKABULKAN	DITOLAK		
1	Dhining Wulansari	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
2	Hendro Prasetyo Adi	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
3	Arie Kusdewanto	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
4	Sunarto	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
5	Ibnu Sutopo	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
6	Didid Purwanto	6 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
7	Didik Karma Hendra	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
8	Rayhan Aditya	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
9	Dennis Tjahyadi Gotama Tjan	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
10	Dwi Prasetyowati	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
11	Sri Wahyuni	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
12	Narniati	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
13	Ibnu Sutoro	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
14	Ibnu Sutoro	1 Hari	V		Melihat/	Diberikan informasi

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MADIUN TAHUN 2019

					Mengetahui	untuk melihat dan mengetahui
15	Didik	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
16	Edy	2 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
17	F. Bagus Panuntun	2 Hari	V		Meminta Salinan	Meminta Salinan
18	Drs. Sonny Noersal	3 Hari		V	Meminta Salinan terkait SK Walikota Madiun yang terbaru, mengenai harga satuan pokok kegiatan (HSPK)	Ditolak karena permohonan informasi yang diminta belum didokumentasikan
19	Warsini	5 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
20	Darwito	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
21	Purwanto	1 Hari	V		Melihat/ Mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui
22	Febri Adi Darmawan	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
23	Ir. Lilies Sugiharti	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
24	Budiman	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
25	Debi Wira	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
26	Debi	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
27	Eko Purwanto	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi
28	Putri	1 Hari	V		Meminta Salinan	Diberikan Salinan Informasi

**Penjelasan**

No	Tgl	Nama	Sifat Permohonan	Permohonan Informasi	Tujuan	Pemberian Informasi	Tgl
1	02/01	Dhining Wulansari	Badan Publik	Cara mengupload foto di web PPID	Untuk mengupload data di web PPID Disdukcapil	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	02/01
2	21/01	Hendro Prasetyo Adi	Badan Publik	Koordinasi berkaitan permohonan	Konsultasi terkait permohonan	Diberikan informasi untuk melihat dan	21/01

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MADIUN TAHUN 2019

				informasi	informasi	mengetahui kepada pemohon	
3	25/01	Arie Kusdewanto	Badan Publik	Koordinasi berkaitan permohonan informasi	Konsultasi terkait permohonan informasi	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	25/01
4	31/01	Sunarto	Badan Publik	Meminta brosur PPID	Untuk mengetahui dasar hukum	Diberikan salinan informasi secara langsung kepada pemohon	31/01
5	31/01	Ibnu Sutopo	Badan Publik	Contoh laporan tahunan PPID	Untuk melihat dan mengetahui	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	31/01
6	14/02	Didid Purwanto	Perseorangan	Permohonan informasi : Peta Kota Madiun, Data Perumahan, dan Data sekolah dan hotel	Untuk perluasan usaha	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	20/02
7	15/02	Didik Karma Hendra	Badan Publik	Mengisi /memasukkan berita ke website	Agar website lebih aktif	Diberikan informasi untuk dilihat dan diketahui oleh pemohon	15/02
8	16/02	Rayhan Aditya	Perseorangan	Permohonan data bagian struktur Pemkot madiun	Penelitian skripsi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	16/02
9	13/03	Dennis Tjahyadi Gotama Tjan	Perseorangan	Permohonan wawancara terkait pengaduan	Penelitian skripsi	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	13/03
10	25/03	Dwi Prasetyowati	Perseorangan	Dokumen kegiatan KKN magang profesi	Untuk melengkapi kegiatan KKN Magang profesi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	25/03
11	22/04	Sri Wahyuni	Badan Publik	Konsultasi mengenai informasi yang dikecualikan	Untuk membuat laporan data informasi yang dikecualikan	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	22/04
12	07/05	Narniati	Badan Publik	Pembaharuan daftar informasi yang dikecualikan	Untuk pembaharuan dan penambahan daftar	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	07/05

LAPORAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA MADIUN TAHUN 2019

					informasi yang dikecualikan		
13	08/05	Ibnu Sutoro	Badan Publik	File foto sertijab Walikota Madiun	Untuk Dokumentasi Sekretariat DPRD	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	08/05
14	31/05	Ibnu Sutoro	Badan Publik	Melengkapi kekurangan data PPID	Untuk kelengkapan data website PPID DPRD	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	31/05
15	26/06	Didik	Badan Publik	Tata cara memasukkan berita dan foto di web PPID	Untuk kelengkapan data website PPID	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	26/06
16	18/07	Edy	Perseorangan	Permohonan informasi terkait tatib DPRD, Polegda, APBD	Kajian serta penambahan pustaka	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	19/07
17	18/07	F. Bagus Panuntun	Perseorangan	Permohonan informasi terkait tatib DPRD, Polegda, APBD	Analisa informasi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	19/07
18	22/07	Drs. Sonny Noersal	Perseorangan	SK Walikota tentang HSPK	Referensi dalam penyusunan proposal proyek	Permohonan ditolak dikarenakan data/informasi yang diminta belum didokumentasikan	22/07
19	20/08	Warsini	Perseorangan	Informasi mengenai pensiunan guru yang memiliki usaha	Ingin tergabung dalam komunitas	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	25/08
20	11/09	Darwito	Badan Publik	Cara update di web PPID	Untuk peningkatan layanan informasi ke masyarakat	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	11/09
21	04/10	Purwanto	Badan Publik	Akses masuk ke PPID Kel. Patihan	Untuk mengaktifkan website PPID Patihan	Diberikan informasi untuk melihat dan mengetahui kepada pemohon	04/10
22	21/10	Febri Adi Darmawan	Badan Publik	- Foto Walikota + ibu - Foto Wawali	Pembuatan kartu anggota perpustakaan	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung	21/10

				+ Bapak - Foto Sekda + ibu		kepada pemohon	
23	28/10	Ir. Lilies Sugiharti	Perseorangan	Video kangen diklat PIM II Tahun 2003	Untuk album kenangan pribadi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	28/10
24	01/11	Budiman	Badan Publik	Buku Panca Karya	Kelengkapan pustaka instansi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk hardcopy secara langsung kepada pemohon	01/11
25	11/11	Debi Wira	Badan Publik	Buku Panca Karya	Kelengkapan pustaka instansi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk hardcopy secara langsung kepada pemohon	18/11
26	15/11	Debi	Badan Publik	File foto kegiatan Kadarkum	Untuk arsip dokumentasi	Diberikan salinan informasi dalam bentuk hardcopy secara langsung kepada pemohon	15/11
27	18/11	Eko Purwanto	Perseorangan	Foto acara keagamaan di Kota Madiun	Untuk kalender Masjid Agung	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	27/09
28	20/11	Putri	Perseorangan	Laporan Keuangan Kota Madiun	Untuk tugas kuliah	Diberikan salinan informasi dalam bentuk softcopy secara langsung kepada pemohon	20/11

## 2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Kota Madiun menetapkan waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB

Jumat : Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung



(media online). Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi publik diupayakan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

### 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

<b>Permohonan Informasi Publik Tahun 2019</b>		
<b>PPID Kota Madiun</b>		
<b>No</b>	<b>Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Permohonan yang masuk	28 Permohonan
2	Permohonan yang diterima	27 Permohonan
3	Permohonan yang ditolak	1 Permohonan

PPID Kota Madiun terdapat 28 permohonan informasi yang masuk di PPID Utama, dimana 27 permohonan informasi tersebut diterima untuk diberikan informasi publik yang diminta pemohon dan 1 permohonan ditolak karena informasi yang diminta terkait salinan SK Walikota Madiun mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) tidak ada dalam peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Madiun, namun jika informasi yang diminta adalah Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK) dapat mendatangi bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Berdasarkan laporan yang masuk 28 permohonan informasi jika dijabar berdasarkan jenis informasi yang diminta sebagai berikut :

<b>Permohonan Informasi Publik Tahun 2019</b>		
<b>PPID Kota Madiun</b>		
<b>No</b>	<b>Jenis Permohonan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Konsultasi	12 Permohonan
2	Publikasi	3 Permohonan

3	TIK	-
4	Anggaran/ Keuangan	1 Permohonan
5	Perda/ Perwal	1 Permohonan
6	Dokumentasi	6 Permohonan
7	Data	5 Permohonan

Dari data di atas dapat diketahui sebagian besar data atau informasi yang diminta di PPID Kota Madiun Tahun 2019 adalah layanan konsultasi. Konsultasi disini kebanyakan adalah permohonan bantuan untuk tata cara pengisian website PPID Pembantu oleh admin PPID Pembantu, selain itu juga ada konsultasi permohonan bantuan penanganan pemecahan permasalahan yang terjadi di media sosial pemohon.

## **BAB IV**

### **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2019 PPID Utama maupun PPID Pembantu Kota Madiun belum dihadapkan pada permasalahan sengketa informasi. Hal ini dikarenakan PPID Kota Madiun berusaha memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik selengkap-lengkapya baik itu penyampaian informasi langsung maupun penyampaian melalui media-media yang dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun melalui PPID Kota Madiun membuka akses besar penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan mulai dari visi misi, program kegiatan, anggaran, peraturan yang berlaku maupun informasi dan dokumentasi publik lainnya. PPID Kota Madiun berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan lebih efisien kepada pemohon informasi.

## **BAB V**

### **Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di PPID Kota Madiun Tahun 2019**

#### **1. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

- a. Masih ada beberapa PPID Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID.
- b. Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID khususnya di PPID Pembantu.
- c. Terbatasnya kompetensi dari SDM PPID.
- d. Terbatasnya sarana prasarana di PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

#### **2. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik**

- a. Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- b. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

## **BAB VI**

### **Capaian Kinerja PPID Tahun 2019**

Sepanjang perjalanan Tahun 2019 PPID Kota Madiun berhasil menorehkan beberapa capaian maupun prestasinya yang diharapkan mampu menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Kota Madiun khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut beberapa capaian maupun prestasi yang diperoleh PPID Kota Madiun tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Deseminasi informasi melalui media sosial Pemerintah Kota Madiun, grup Whatsapp, tabloid Madiun Karismatik, Radio Suara Madiun, hingga melalui aplikasi LAPOR SP4N!
2. Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu yang dilaksanakan tiap semester berhasil meningkatkan kinerja PPID Pembantu dalam hal memberikan pelayanan informasi publik.
3. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM admin PPID Pembantu yang meliputi pelatihan pengelolaan desain website, pelatihan pengelolaan server website, dan pelatihan jurnalistik.
4. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Jawa Timur Tahun 2019, didapatkan hasil PPID Kota Madiun masuk nominator kategori Badan Publik Informatif Kab/Kota se – Jawa Timur.
5. LAPOR SP4N! Kota Madiun mendapatkan penghargaan Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Layanan Publik Tahun 2019.
6. Terbentuknya *Call Center* 112 menjadikan sarana kemudahan masyarakat dalam memberikan laporan tentang kejadian darurat di lingkungan Kota Madiun

## BAB VII

### Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Prestasi dan capaian kerja PPID Kota Madiun selama tahun 2019 cukup membanggakan Pemerintah Kota Madiun, namun hal tersebut tidak terus melenakan PPID Kota Madiun untuk terus berbenah menuju pelayanan informasi publik yang lebih baik lagi.

Berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, PPID Kota Madiun terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan oleh PPID Kota Madiun Tahun mendatang :

1. Sosialisasi peran dan fungsi PPID kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
2. Peningkatan kapasitas admin PPID melalui pelatihan – pelatihan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu.
4. Mendorong kinerja PPID Pembantu untuk peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
5. Koordinasi terkait sarana–prasarana *desk* informasi pelayanan informasi publik di PPID Pembantu.
6. Diseminasi informasi melalui berbagai *chanel* atau media informasi yang ada.
7. Penanganan permohonan informasi secara lebit cepat, tepat dan efisien.
8. Memperbanyak penyampaian informasi ke masyarakat melalui PPID pembantu
9. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran
10. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
11. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID utama dan PPID pembantu.
12. Peningkatan implementasi SOP PPID.
13. Peningkatan dan penilaian PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## **BAB VIII**

### **Kesimpulan**

Pemerintah Kota Madiun membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam SK Walikota Madiun Nomor 042-401.109/21/2017 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dimana PPID Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya berpedoman pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017.

Pada tahun 2019 PPID Kota Madiun melaksanakan dua belas kegiatan dalam satu tahun, dimana kegiatan-kegiatan tersebut untuk meningkatkan kinerja PPID di Kota Madiun. Kegiatan seperti pelatihan-pelatihan admin PPID pembantu dapat membuat PPID di Kota Madiun menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Dengan terus melakukan perbaikan ditahun-tahun sebelumnya, PPID Kota Madiun memperoleh beberapa prestasi di tahun 2019, yaitu mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Kab/Kota se-Jawa Timur dari Komisi Informasi Jawa Timur, serta mendapatkan penghargaan top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik melalui aplikasi LAPOR SP4N!.

Prestasi dan capaian kinerja PPID Kota Madiun di tahun 2019 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Kota Madiun yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Madiun dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kota Madiun khususnya.

## LAMPIRAN FOTO PPID KOTA MADIUN



Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Madiun Semester I Tahun 2019





Bimbingan Teknis Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang dkecualikan



Pelatihan Admin PPID pada Desain Web PPID Pembantu Kota Madiun



Sosialisasi tentang Transparansi Anggaran dalam Keterbukaan Informasi Publik



Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu Kota Madiun Semester II tahun 2019



Pelatihan Website PPID Pembantu Kota Madiun Tahun 2019



Pelatihan Jurnalistik PPID Pembantu Kota Madiun Tahun 2019



PPID Award Tingkat Kota Madiun, Tahun 2019

